

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ketidakmerataan dalam pembangunan wilayah adalah masalah historis yang dihadapi oleh setiap negara mulai dari aras kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan bahkan global (Firdaus, 2013). Di Indonesia Pembangunan wilayah bagian timur lebih tertinggal dibandingkan dengan bagian barat. Pada tingkat kota wilayah barat misalnya Kota Mataram memiliki pertumbuhan baik ekonomi dan kesejahteraan (diindikasikan tingkat pengangguran dan kemiskinan) yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah Kota Bima (IPM Kota Mataram, 2022). Terjadinya fenomena tersebut dapat disebabkan oleh faktor keterbukaan/akses terhadap luar wilayah yang sudah berlangsung sejak lama. Ini menghasilkan ukuran pasar yang lebih besar karena konsentrasi jumlah penduduk di wilayah yang lebih maju tersebut; meskipun wilayah yang kurang berkembang tersebut banyak yang lebih kaya dengan sumberdaya alam.

Ketidakmerataan pembangunan merujuk pada situasi di mana pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur tidak merata di berbagai wilayah atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Fenomena ini bisa terjadi karena sejumlah faktor yang kompleks dan beragam.

Pemerintah sudah memberi perhatian dalam terjadinya ketidakmerataan pembangunan wilayah. Sebagai contoh masalah tersebut sudah menjadi bagian dari Kondisi Umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Fakta

empirik dan beberapa studi menunjukkan ketimpangan antar wilayah di Indonesia semakin mengemuka sejak pertengahan tahun 1995. Dirasakan pula, dengan wewenang Pemerintah Daerah yang semakin besar sejak otonomi dan desentralisasi fiskal, terjadi ketimpangan yang semakin signifikan antara rencana pembangunan di tingkat pusat dengan implementasinya di tingkat daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, penanganan ketimpangan pembangunan wilayah menjadi semakin penting mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap isu ini, pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi relevan dalam konteks pembangunan wilayah. Perubahan fokus pengukuran, seperti peralihan dari penekanan pada aspek ekonomi ke Human Development Index (HDI), mencerminkan upaya untuk lebih holistik dalam menilai kesejahteraan, termasuk aspek-aspek sosial dan pendidikan. Dengan demikian, melibatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal dalam konteks pembangunan wilayah menjadi semakin krusial untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan dan merata.

Besarnya kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. Kesejahteraan realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1980-an

terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerjadan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ulhaq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan perkapita. (Sardar, 2016 : 394)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam konteks organisasi sektor publik adalah pengalokasian anggaran dan dampaknya pada belanja modal. Pengalokasian anggaran merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan signifikan untuk mengalokasikan penerimaan yang diperoleh agar dapat mendukung belanja daerah yang bersifat produktif.

Pengalokasian anggaran ini berdampak langsung pada belanja modal, yaitu alokasi dana untuk program-program jangka panjang dirancang untuk meningkatkan aset tetap dan mendukung perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pengalokasian anggaran menjadi kunci dalam mencapai efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa belanja modal dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Dengan memperhatikan tantangan dalam pengalokasian anggaran dan belanja modal, penting juga untuk

mempertimbangkan peran Pendapatan Asli Daerah sebagai aspek krusial dalam keberlanjutan keuangan daerah.

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk menjelaskan kesuksesan pembangunan ekonomi wilayah lantaran Pendapatan Asli Daerah ialah nilai pemasukan yang benar-benar disetujui oleh wilayah serta pengembangan ketentraman warga. Meningkatkan banyak nilai PAD pada suatu kawasan bermakna meningkatkan banyak jumlah Pembangunan, serta meningkatnya kemakmuran masyarakat. Selain itu salah satu instrumen keuangan yang sangat penting dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia ialah DAU. Secara umum, DAU disalurkan ke daerah untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengaruh PAD, DAU, dan DBH pada penelitian ini terhadap pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh fleksibilitas variabel pendapatan daerah tersebut dalam pemanfaatannya yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Saraswati & Ramantha, 2018).

Penelitian oleh Saraswati dan Arka (2016) menunjukkan hasil dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali Periode 2009 – 2013. Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus

dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Nuarisa, 2013).

Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008); Wulandari, dkk (2013) dan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Arwati & Hadiati (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kondisi demikian disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh perhatian terhadap isu signifikan dalam konteks ekonomi daerah, Khususnya terkait rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Bima (Capaian PAD Kabupaten Bima, 2021). Berdasarkan sumber informasi yang melaporkan rendahnya pencapaian PAD di wilayah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dampaknya terhadap

stabilitas ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Bima, Prov Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Kesejahteraan Masyarakat dengan Belanja Modal sebagai variabel mediasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga ditarik judul penelitian ini “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Belanja Modal sebagai variable mediasi (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
2. Apakah DAU berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
4. Apakah PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal?
5. Apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal?
6. Apakah PAD berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal sebagai variable mediasi?
7. Bagaimana pengaruh DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal sebagai variable mediasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
2. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
4. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.
5. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.
6. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal sebagai variable mediasi.
7. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal sebagai variable mediasi.

C.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan baru mengenai Pengaruh PAD, DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang dimediasi oleh Belanja Modal. Hasil

penelitian juga ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi literatur ilmu Akuntansi, khususnya mengenai PAD dan DAU.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

